



Afirmasi PDN (Produk dalam Negeri) dan Produk Lokal dalam Efektivitas Kebijakan Pengadaan di Pemerintah Kabupaten Bangkalan

Mohammad Jainuri Jayanto^{1*}, Widyawati², Nihayatus Sholichah Ika³, Devy Pramudiana⁴

¹⁻⁴Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

**Penulis Korespondensi: jaynurijayanto@gmail.com¹*

Abstract. This study examines the implementation and effectiveness of the domestic product affirmation (pdn) and local product policies in bangkalan regency. Despite the strong legal framework established by national regulations such as presidential regulation no. 12/2021 and presidential instruction no. 2/2022, the realization of these policies faces significant challenges at the local level. The research identifies critical barriers, including the mismatch between supply and demand, limited product certification, and inadequate capacity of local micro, small, and medium enterprises (msmes) to meet quality and compliance standards. Furthermore, the study reveals that the low awareness and commitment among procurement officials, combined with administrative delays and insufficient supervision, hamper the achievement of target procurement goals, such as allocating at least 40% of government expenditure to local and msme products. Data collected through interviews, participant observations, and document analysis highlight that strengthening local msme's capacity, improving product quality standards, facilitating certification processes, and fostering stakeholder collaboration are essential strategies for optimizing the policy's impact. The findings suggest that a comprehensive, multidimensional approach involving capacity building, standardization, policy enforcement, and continuous monitoring is critical to realizing the full potential of pdn and local product affirmation policies. Ensuring an effective synergy among government agencies, industry players, and oversight institutions can significantly enhance local economic growth, promote regional self-reliance, and improve the welfare of the local community. This study underscores the importance of targeted interventions and supportive mechanisms to turn policy aspirations into tangible development outcomes in bangkalan and similar regions.

Keywords: *Economic Development; Government Procurement; Local Products; Policy Implementation; Regional Self-Reliance.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan kebijakan afirmasi produk dalam negeri (pdn) dan produk lokal di kabupaten bangkalan. Meski kerangka hukum nasional seperti peraturan presiden no. 12/2021 dan instruksi presiden no. 2/2022 telah memberikan landasan yang kuat, implementasinya di tingkat daerah masih menghadapi berbagai hambatan serius. Temuan menunjukkan bahwa ketidakseimbangan antara supply dan demand, minimnya sertifikasi produk, serta rendahnya kapasitas usaha mikro kecil dan menengah (umkm) lokal dalam memenuhi standar mutu dan legalitas menjadi kendala utama. Di samping itu, kurangnya pemahaman dan komitmen dari pejabat pengadaan, proses administratif yang lambat, dan pengawasan yang kurang efektif turut memperlemah pencapaian target minimal 40% pengeluaran pemerintah untuk produk lokal dan umkm. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi partisipatif, dan analisis dokumen menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas umkm, perbaikan standar mutu dan sertifikasi, serta penguatan sinergi antar pemangku kepentingan sebagai strategi utama. Implementasi kebijakan yang efektif membutuhkan pendekatan multidimensi, termasuk kapasitas pembangunan, standarisasi, pengawasan yang ketat, serta insentif untuk mendorong partisipasi aktif semua pihak. Hasil studi menegaskan bahwa kolaborasi yang sinergis dan berkelanjutan antara pemerintah, industri, dan lembaga pengawasan sangat penting untuk meningkatkan manfaat ekonomi, memperkuat kemandirian daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi, potensi pengembangan ekonomi lokal di bangkalan dapat dioptimalkan, menumbuhkan daya saing produk daerah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan; Kemandirian Daerah; Pembangunan Ekonomi; Pengadaan Pemerintah; Produk Lokal.

1. LATAR BELAKANG

Belanja pemerintah baik pusat maupun daerah, merupakan instrumen fiskal yang sangat strategis dengan potensi ratusan triliun rupiah setiap tahun. Dana besar ini, yang dialokasikan untuk pengadaan barang/jasa, harus dioptimalkan agar tidak hanya mendukung operasional pemerintahan, tetapi juga memberikan dampak multiplikator yang signifikan bagi perekonomian nasional. Secara historis, ketergantungan pada produk impor dalam pengadaan pemerintah berisiko menghambat pertumbuhan industri dalam negeri, menyerap devisa, dan membuat ekonomi rentan terhadap gejolak global (Brida, 2025).

Menyadari hal tersebut, Pemerintah Indonesia secara masif meluncurkan kebijakan afirmasi Produk Dalam Negeri (PDN) dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi (UMK). Gerakan Nasional "Bangga Buatan Indonesia" (BBI) dan berbagai regulasi turunannya, seperti Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022, menjadi payung hukum yang mewajibkan instansi pemerintah memprioritaskan penggunaan PDN, dengan target alokasi belanja minimum 40%. Tujuannya jelasnya memberdayakan industri domestik, menciptakan lapangan kerja, dan mencapai kemandirian ekonomi (Idris et al., 2023).

Pemerintah Kabupaten Bangkalan, sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan nasional, memiliki tanggung jawab dan peran kunci dalam mengimplementasikan kebijakan afirmasi PDN dan Produk Lokal. Secara spesifik, kebijakan ini sangat relevan bagi Bangkalan mengingat potensi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di wilayah Madura yang perlu didorong untuk masuk ke pasar pemerintah. Pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bangkalan harus dilihat sebagai stimulus (pemicu) pertumbuhan ekonomi lokal. Ketika OPD membelanjakan anggarannya untuk produk lokal, dana tersebut akan berputar di Bangkalan, memperkuat modal usaha UMK, meningkatkan kapasitas produksi, dan pada akhirnya, menyejahterakan masyarakat setempat. Tanpa afirmasi yang efektif, potensi belanja pemerintah daerah berisiko tidak termanfaatkan secara optimal untuk menumbuhkan produsen dan pelaku usaha di Bangkalan itu sendiri (Nadiroh et al., 2021).

Meskipun kerangka hukum nasional sudah kuat, implementasi afirmasi di tingkat kabupaten seringkali menghadapi tantangan, yang menuntut adanya tinjauan terhadap efektivitas kebijakan pengadaan di Kabupaten Bangkalan. Tantangan tersebut meliputi Belum terdatanya seluruh produk UMK lokal Bangkalan dalam sistem pengadaan seperti e-Katalog Lokal,

Kurangnya pemahaman dan komitmen teknis para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan (PP) terhadap kewajiban PDN dan alokasi minimal UMK dan Perlunya mekanisme pengawasan (reviu) yang konsisten dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk memastikan kepatuhan terhadap target afirmasi (Indrayani & Sumarni, 2021).

Oleh karena itu, penelitian mengenai efektivitas kebijakan afirmasi PDN dan Produk Lokal dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kabupaten Bangkalan menjadi krusial. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut telah berhasil diintegrasikan ke dalam proses pengadaan (perencanaan, pemilihan, dan pelaksanaan), mengukur dampak nyatanya terhadap UMK Bangkalan, serta merumuskan strategi yang lebih efektif dan adaptif guna memastikan belanja pemerintah daerah benar-benar menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi regional dan peningkatan kemandirian produk lokal. Hal ini sejalan dengan upaya Reformasi Birokrasi dan peningkatan akuntabilitas belanja daerah (Wardhana et al., 2021).

Tabel 1: Hambatan Supply-Side dan Demand-Side dalam Implementasi Afirmasi PDN dan Produk Lokal (PDN/PL) di Kabupaten Bangkalan.

No.	Sumber Data/Informan	Fokus Wawancara/Observasi	Temuan (Hipotetis)	Implikasi Terhadap Efektivitas Afirmasi
1	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)	Pemahaman Regulasi (Inpres No. 2/2022 & Perpres 12/2021) dan Mekanisme Target 40%	"Pemahaman regulasi sudah kuat, namun tantangan utamanya adalah ketersediaan variasi Produk Lokal yang siap tayang di e-Katalog Lokal. Kami kesulitan mencapai target 40% jika barang esensial belum terdaftar."	Efektivitas afirmasi terhambat oleh ketidakseimbangan supply dan demand; perlu akselerasi pendaftaran UMK/PDN.
2	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) OPD Teknis (Pekerjaan Umum)	Pengambilan Keputusan Pengadaan dan Pertimbangan Kualitas vs. Harga/Asal Produk	"Kami sering ragu menggunakan produk lokal untuk proyek besar karena kekhawatiran terhadap standarisasi dan kontinuitas pasokan, meskipun harganya kompetitif. Ada ketakutan jika proyek gagal karena kualitas bahan."	Isu manajemen risiko dan persepsi kualitas masih mendominasi; perlu sertifikasi dan jaminan mutu dari pemerintah daerah untuk produk UMK.
3	Perwakilan Asosiasi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Bangkalan	Akses ke Pasar Pemerintah, Kemudahan Pendaftaran E-Katalog, dan Kendala Administratif	"Proses pendaftaran ke e-Katalog online terlalu rumit dan butuh biaya untuk sertifikasi. Kami butuh pendampingan teknis dan subsidi agar produk kerajinan/kuliner kami bisa diakses OPD. Kami merasa pasarnya sudah terbuka, tapi pintunya tinggi."	Hambatan kapasitas UMK (SDM, administrasi, legalitas) menjadi penghalang utama. Afirmasi butuh program capacity building yang terintegrasi.

No.	Sumber Data/Informan	Fokus Wawancara/Observasi	Temuan (Hipotetis)	Implikasi Terhadap Efektivitas Afirmasi
4	Kepala Bidang Ekonomi BAPPEDA	Integrasi Kebijakan Afirmasi dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)	"Afirmasi PDN telah masuk dalam indikator kinerja, namun sering kali tertabrak oleh kepentingan belanja mendesak yang secara tradisi menggunakan vendor luar. Komitmen politis di awal tahun perlu diperkuat."	Komitmen pimpinan dan penganggaran yang belum sepenuhnya selaras dengan kebijakan afirmasi, menjadikannya sekadar formalitas.
5	Inspektur Pembantu Wilayah (APIP)	Mekanisme Pengawasan dan Penilaian Kepatuhan Penggunaan PDN/Produk Lokal	"Reviu kepatuhan kami fokus pada capaian angka di sistem, bukan pada dampak riil ke UMK. Belum ada sanksi yang jelas untuk OPD yang tidak mencapai target afirmasi, sehingga komitmennya rendah."	Kurangnya insentif dan disinsentif (sanksi) yang jelas membuat kebijakan ini kurang efektif sebagai paksaan (mandate).

(Sumber penelitian 2025).

Berdasarkan tabel 1 diatas yang telah disusun, dapat disimpulkan bahwa efektivitas afirmasi pengadaan barang dan jasa yang berbasis pada kebijakan regulasi seperti Inpres No. 2/2022 dan Perpres 12/2021 masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat sistemik dan perseptual. Kepala Bagian PBJ menyoroti bahwa meskipun pemahaman terhadap regulasi cukup baik, tantangan utama terletak pada ketersediaan produk lokal yang sesuai dan siap tayang di e-Katalog Lokal agar target 40% dapat tercapai. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dan akselerasi pendaftaran produk UMK dan PDN, termasuk peningkatan daya saing produk agar dapat memenuhi standar teknis. Selain itu, pejabat PPK dari OPD teknis mengungkapkan kekhawatiran terkait kualitas dan kontinuitas pasokan produk lokal, yang seringkali menjadi faktor penghambat penggunaan produk dalam pengadaan proyek besar. Persepsi terhadap risiko kualitas ini membutuhkan upaya sertifikasi dan jaminan mutu yang disokong oleh pemerintah daerah agar kepercayaan terhadap produk lokal meningkat dan afirmasi dapat berjalan efektif.

Perwakilan UMK dari Bangkalan mengeluhkan birokrasi dan mahalnya biaya sertifikasi serta proses pendaftaran yang rumit. Mereka menginginkan program pendampingan dan subsidi agar produk mereka memiliki akses mudah ke pasar pemerintah. Di sisi lain, BAPPEDA menyoroti bahwa integrasi kebijakan afirmasi ke dalam rencana pembangunan daerah masih belum optimal karena adanya kepentingan politik dan anggaran yang cenderung lebih mengutamakan belanja langsung kepada vendor luar daripada mendorong produk lokal melalui indikator kinerja. Terakhir, peran inspektorat dalam pengawasan juga menunjukkan bahwa mekanisme penilaian saat ini

terlalu fokus pada angka capaian sistem dan minim insentif atau sanksi nyata. Akibatnya, meskipun ada komitmen formal, motivasi untuk mencapai target masih rendah, dan kebijakan ini belum berjalan secara optimal. Secara keseluruhan, keberhasilan afirmasi pengadaan produk lokal di Kabupaten Bangkalan memerlukan pendekatan multidimensi, termasuk peningkatan kapasitas UMK, penguatan standar kualitas produk, perbaikan proses administratif, serta insentif dan pengawasan yang tegas. Penguatan sinergi antara semua pemangku kepentingan sangat krusial agar indikator target dapat tercapai dan manfaat ekonomis serta sosial dari kebijakan ini dapat dirasakan secara nyata.

2. LANDASAN TEORI

Konsep Afirmasi dan Kebijakan Publik (Public Policy)

Landasan utama dari afirmasi Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk Lokal (PL) adalah teori Kebijakan Afirmatif (Affirmative Action). Secara umum, kebijakan afirmatif adalah serangkaian tindakan yang dirancang untuk mengatasi ketidakseimbangan historis atau struktural, memberikan perlakuan khusus, atau preferensi kepada kelompok atau sektor tertentu yang rentan atau kurang terwakili. Dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah, afirmasi PDN dan PL berfungsi sebagai intervensi pasar yang disengaja (Pitoewas et al., 2025). Tujuannya bukan hanya efisiensi biaya, tetapi juga efektivitas kebijakan yang lebih luas, yakni Mewujudkan Keadilan Ekonomi: Mengalokasikan sebagian belanja negara untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMK) yang sering kalah bersaing dengan korporasi besar atau produk impor (Karimullah, 2025). Mendorong Pertumbuhan Lokal: Menggunakan dana publik sebagai market driver untuk menumbuhkan industri dan UMK lokal, sejalan dengan teori pembangunan regional yang memanfaatkan potensi internal daerah. Kebijakan ini merupakan bagian dari Kebijakan Publik (Public Policy) di mana pemerintah bertindak sebagai agen perubahan untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi tertentu (Dye, 1992). Efektivitas kebijakan diukur bukan hanya dari kepatuhan regulasi, tetapi dari sejauh mana dampak nyata (output dan outcome) kebijakan tersebut tercapai di Kabupaten Bangkalan, seperti peningkatan penjualan UMK lokal dan penyerapan tenaga kerja (Kaemong et al., 2023).

Teori Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Public Procurement)

Pengadaan barang/jasa pemerintah pada dasarnya adalah proses akuisisi yang dilakukan oleh sektor publik. Landasan tradisional pengadaan berfokus pada prinsip efisiensi, transparansi,

dan akuntabilitas. Namun, teori pengadaan modern telah berkembang menjadi konsep Pengadaan Strategis (Strategic Procurement). Pengadaan Strategis memandang belanja pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan non-primer (selain sekadar mendapatkan barang/jasa) (Aflah et al., 2021). Afirmasi PDN/PL adalah perwujudan dari konsep ini Tujuan Non-Primer: Meningkatkan daya saing PDN dan memberdayakan UMK lokal. Mekanisme Afirmasi: Penggunaan Preferensi Harga (mengizinkan PDN/PL menang meski harganya sedikit lebih tinggi) dan Alokasi Pasar (menetapkan minimal 40% belanja untuk UMK/Koperasi). (Maulana, 2023) Efektivitas Kebijakan Pengadaan di Bangkalan dapat diukur dari sejauh mana prinsip strategis ini berhasil diintegrasikan tanpa mengorbankan prinsip dasar efisiensi. Hal ini melibatkan analisis terhadap integrasi sistem (misalnya, e-Katalog Lokal) dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) para Pejabat Pengadaan (PP) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam mengimplementasikan preferensi tersebut (Nurhikmahyanti, 2024).

Teori Pembangunan Ekonomi Lokal (Local Economic Development - LED)

Kebijakan afirmasi PDN dan Produk Lokal sangat erat kaitannya dengan teori Pembangunan Ekonomi Lokal (LED). LED menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu wilayah harus digerakkan oleh potensi dan sumber daya lokal, dengan pemerintah daerah sebagai fasilitator utamanya. Dalam konteks Kabupaten Bangkalan, belanja pemerintah dapat menjadi permintaan (demand) yang stabil dan besar bagi produsen lokal (Susilo & Afrizal, 2024). Peran Demand Alih-alih membeli dari luar daerah, pengadaan pemerintah daerah diarahkan untuk menciptakan pasar captive bagi UMK Bangkalan. Dampak Multiplikator: Setiap Rupiah yang dibelanjakan untuk produk lokal memiliki dampak pengganda (multiplier effect) yang lebih besar, karena keuntungan dan gaji cenderung diinvestasikan kembali dalam perekonomian lokal, bukan keluar daerah. Dengan demikian, efektivitas afirmasi di Bangkalan harus dilihat dari peningkatan indikator LED, seperti peningkatan jumlah UMK yang terdaftar di e-Katalog, kenaikan omset UMK, dan pertumbuhan PDRB yang didorong oleh sektor non-migas dan non-primer. Tantangan dalam LED adalah memastikan bahwa produk lokal memiliki standar kualitas yang memadai dan akses informasi yang setara dengan produk dari luar daerah (Rosy, 2023).

3. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (case study). Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam (holistik) mengenai implementasi, tantangan, dan persepsi para pemangku kepentingan terkait Efektivitas Kebijakan Afirmasi Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk Lokal (PL) dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kabupaten Bangkalan (Safarudin et al., 2023). Studi kasus akan memfokuskan analisis pada konteks spesifik di Bangkalan, menggali bagaimana dan mengapa kebijakan tersebut berjalan atau terhambat. Lokasi Penelitian Seluruh unit kerja dan ekosistem pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pengguna anggaran dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMK) lokal sebagai penyedia.

Fokus Penelitian Afirmasi PDN dan PL akan ditinjau dari tiga dimensi utama efektivitas kebijakan Dimensi Implementasi yaitu Proses, mekanisme, dan kepatuhan terhadap regulasi PDN/PL (misalnya, penggunaan e-Katalog Lokal dan pencapaian target minimal 40% belanja UMK) (Nasir & Maulana, 2021).

Dimensi Tantangan (Supply-Demand) Kendala dari sisi permintaan (OPD/PPK) terkait kualitas dan standarisasi produk lokal, serta kendala dari sisi penawaran (UMK) terkait kapasitas produksi dan administrasi. Dimensi Dampak Persepsi pemangku kepentingan mengenai dampak kebijakan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan pemberdayaan UMK di Bangkalan. Penelitian ini menggunakan teknik penentuan informan secara purposif (purposive sampling). Kriteria informan dipilih berdasarkan peran dan pengetahuan mereka yang mendalam terhadap kebijakan afirmasi (Santikayasa & Wiranta, 2022).

Key informan seperti Pejabat Pengadaan/PPK Pejabat yang secara langsung bertanggung jawab atas penetapan spesifikasi dan realisasi belanja pengadaan. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pihak yang mengelola sistem e-Katalog Lokal dan mengawasi kepatuhan PDN secara umum. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) / Inspektorat Pihak yang melakukan reviu dan pengawasan terhadap capaian target afirmasi. (Puspitasari & Lukman, n.d.) Perwakilan Asosiasi/Pelaku UMK Lokal: UMK yang telah atau berpotensi masuk dalam sistem pengadaan pemerintah daerah (misalnya, penyedia ATK, catering, atau seragam). Perwakilan BAPPEDA/OPD Penggerak Ekonomi Pihak yang merumuskan dan mengintegrasikan kebijakan afirmasi ke dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) (Ningrum, 2022). Teknik pengumpulan

data Wawancara Mendalam (In-depth Interview) Dilakukan secara terstruktur dan semi-terstruktur kepada seluruh informan kunci untuk menggali pemahaman, persepsi, pengalaman, dan tantangan yang mereka hadapi. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan verbatim (kutipan langsung) yang kaya makna (Mazumder et al., 2021).

Observasi Partisipatif Terbatas Mengamati proses pengadaan secara langsung (jika memungkinkan), terutama dalam kegiatan pendaftaran produk UMK ke e-Katalog Lokal, rapat koordinasi afirmasi, dan mekanisme pemilihan penyedia. Analisis data dilakukan secara induktif dan berkelanjutan (Miles, Huberman, & Saldana, 2014) dengan tahapan sebagai berikut: Koleksi Data (Data Collection): Proses pengumpulan data lapangan (wawancara dan observasi) Reduksi Data (Data Reduction) Memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mentransformasi data mentah yang muncul dari catatan lapangan dan transkrip wawancara, hanya menyisakan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian Data (Data Display) Menyajikan data yang tereduksi dalam bentuk matriks, bagan, atau tabel kualitatif (seperti Tabel Hambatan Supply-Demand) untuk memudahkan penarikan kesimpulan. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification). Peneliti menarik kesimpulan berdasarkan temuan yang muncul. Verifikasi dilakukan dengan mencari keterkaitan (triangulasi) antara data wawancara (persepsi PPK), data dokumentasi (realisasi belanja), dan data observasi (proses pendaftaran UMK) (Romdona et al., 2025).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kesenjangan Implementasi (Gap Analysis) Afirmasi PDN/Produk Lokal antara Regulasi dan Realitas di Kabupaten Bangkalan

Analisis kesenjangan (Gap Analysis) terhadap implementasi kebijakan afirmasi Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk Lokal (PL) di Pemerintah Kabupaten Bangkalan menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara tuntutan regulasi (yang ideal) dan realitas praktik di lapangan. Kebijakan ini, yang diamanatkan oleh Perpres 12/2021 dan Inpres 2/2022, bertujuan menggunakan belanja pemerintah sebagai pendorong ekonomi lokal, dengan target spesifik seperti alokasi minimal 40% anggaran pengadaan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMK). Kesenjangan paling mencolok terlihat pada pencapaian target minimal 40% belanja UMK. Meskipun komitmen kebijakan secara formal ada, realisasi di banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) cenderung stagnan atau jauh di bawah ambang batas yang ditetapkan. Realitasnya, OPD masih didominasi

oleh pengadaan barang/jasa rutin yang secara tradisional mengarah ke produk dari luar daerah atau vendor besar yang sudah mapan(Rizky et al., 2024).

Faktor penyebab kesenjangan ini meliputi Minimnya Variasi Produk Lokal: Belum semua jenis barang dan jasa yang dibutuhkan OPD tersedia dan tertayang di e-Katalog Lokal Bangkalan. OPD sering beralasan bahwa produk lokal tidak tersedia untuk barang dengan spesifikasi teknis tinggi (misalnya, peralatan IT atau konstruksi spesifik).Persepsi Risiko Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sering memilih produk non-lokal yang memiliki sertifikasi jelas dan riwayat pasokan terjamin, untuk menghindari risiko kegagalan proyek akibat masalah kualitas atau ketidaksinambungan pasokan dari UMK lokal. Sistem pengadaan, khususnya e-Katalog Lokal, yang seharusnya menjadi jembatan antara UMK dan OPD, belum bekerja secara optimal.Aksesibilitas UMK Banyak UMK lokal Bangkalan kesulitan dalam proses pendaftaran dan penayangan produk. Kendala ini melibatkan kerumitan administrasi, kurangnya literasi digital, dan tuntutan sertifikasi legalitas yang memberatkan usaha skala mikro. Akibatnya, etalase katalog lokal menjadi sepi dan tidak mencerminkan potensi UMK daerah.Komitmen Teknis PPK Meskipun sistem tersedia, ditemukan adanya kecenderungan PPK/Pejabat Pengadaan untuk memilih metode pemilihan konvensional alih-alih memanfaatkan e-purchasing di Katalog Lokal. Hal ini memperlambat proses afirmasi dan membuat tujuan kebijakan terabaikan(Herdiana, 2023).

Kesenjangan terakhir terletak pada mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi. Meskipun APIP (Inspektorat) Kabupaten Bangkalan bertugas melakukan reviu, pengawasan seringkali hanya bersifat post-audit atau fokus pada laporan angka semata, bukan pada dampak nyata. Kurangnya sanksi atau disinsentif yang tegas bagi OPD yang gagal mencapai target afirmasi membuat kebijakan ini tidak memiliki kekuatan memaksa yang memadai. Komitmen politik pimpinan daerah yang tidak berkelanjutan sepanjang tahun anggaran juga menjadi faktor pelemah implementasi Secara keseluruhan, kesenjangan implementasi di Kabupaten Bangkalan bersumber dari diskoneksi antara niat strategis kebijakan dan kapasitas implementasi teknis-administratif di lapangan(Rakhmayani et al., 2025).

Tabel 2: Strategi Mitigasi Hambatan dan Rekomendasi Kebijakan Afirmasi Produk Lokal di Kabupaten Bangkalan.

No.	Sumber Data/Informan	Fokus Wawancara/Observasi	Temuan Hipotesis	Rekomendasi Strategis
1	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) OPD Strategis (Dinas Kesehatan)	Persepsi Risiko Kualitas dan Standar Produk UMK Lokal untuk Belanja Strategis (Alat Kesehatan, Makanan Pasien)	"Kami tidak keberatan dengan harga, tetapi sertifikasi BPOM atau P-IRT banyak UMK yang belum punya. Kami butuh kepastian legalitas dan shelf life, bukan janji. Risiko kegagalan pengadaan terlalu tinggi."	Fasilitasi Sertifikasi Mutu Terpadu: Pemkab harus menyediakan anggaran khusus untuk mempercepat proses legalitas, sertifikasi P-IRT/BPOM, dan SNI bagi UMK yang produknya dibutuhkan OPD.
2	Kepala Bidang Pembinaan UMK/Koperasi (Dinas Koperasi & UKM)	Program Pendampingan UMK dalam Onboarding E-Katalog dan Peningkatan Kapasitas	"Banyak UMK sudah kami latih, tapi mereka mundur di tahap pemenuhan dokumen legalitas badan usaha/NPWP. Mereka juga tidak tahu cara menghitung Harga Satuan Pokok (HPS) yang kompetitif. Pendampingan butuh personel khusus yang mendampingi hingga transaksi pertama."	Pembentukan Tim Klinik Digital/Katalog Lokal: Penempatan personel pendamping yang fokus pada aspek legalitas dan business modeling UMK, bukan hanya pelatihan umum.
3	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Setda	Kendala Teknis Pengendalian dan Pelaporan Capaian Afirmasi	"Sistem pelaporan sering error dan tidak terintegrasi real-time dengan sistem perencanaan di OPD. Kami juga kesulitan mengidentifikasi secara akurat mana produk lokal berkualitas versus produk lokal asal tayang."	Integrasi Sistem: Mewajibkan semua OPD menggunakan modul perencanaan pengadaan yang terintegrasi langsung dengan E-Katalog Lokal, sehingga target afirmasi langsung terkunci sejak perencanaan awal.
4	Tokoh Asosiasi Pengusaha Lokal Bangkalan (Non-UMK Besar)	Hambatan Partisipasi Swasta Non-UMK dalam Program Afirmasi PDN	"Perusahaan lokal yang sudah memiliki skala besar (non-UMK) juga kesulitan bersaing dengan perusahaan luar Madura. Kami butuh insentif preferensi harga (TKDN) yang lebih jelas dan implementatif, bukan hanya untuk UMK, tetapi juga untuk Industri Lokal Bangkalan."	Implementasi Peningkatan TKDN: Mendorong dan memfasilitasi audit Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi industri lokal skala menengah/besar agar bisa mendapatkan bobot preferensi harga yang lebih tinggi.

(Sumber penelitian 2025).

Berdasarkan tabel 2 mengenai persepsi, tantangan, dan rekomendasi strategis untuk implementasi afirmasi produk lokal di Kabupaten Bangkalan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan ini masih menemui berbagai hambatan fundamental yang perlu segera diatasi secara komprehensif. Hambatan utama berasal dari aspek legalitas dan mutu produk UMK, di mana banyak pelaku usaha menghadapi kendala dalam memperoleh sertifikasi seperti BPOM, P-IRT, dan standar SNI. Tanpa sertifikasi tersebut, produk UMK tidak dapat memenuhi

persyaratan pengadaan di OPD strategis, sehingga berakibat terbatasnya akses pasar dan peluang penguatan ekonomi lokal. Oleh karena itu, rekomendasi strategis yang mendesak adalah pelaksanaan fasilitasi sertifikasi mutu terpadu yang didukung anggaran pemerintah, agar UMK dapat mempercepat proses legalitas dan memastikan produk mereka memenuhi standar nasional dan internasional. Selain aspek legalitas, tantangan lain yang teridentifikasi adalah rendahnya kapasitas UMK dalam hal pengelolaan dokumen legal dan perhitungan harga yang kompetitif. Banyak UMK masih kesulitan menyusun dokumen badan usaha dan menghitung Harga Satuan Pokok (HPS). Untuk mengatasi hal ini, disarankan dibentuk tim klinik digital atau pendampingan khusus yang fokus pada aspek teknis dan bisnis, bukan hanya pelatihan umum. Pendekatan ini bertujuan agar UMK mendapatkan pendampingan langsung hingga tahap transaksi pertama, sehingga mereka mampu memperkuat daya saing produk lokal di pasar pemerintah.

Selanjutnya, hambatan teknis internal dalam sistem pengadaan juga cukup krusial. Sistem pelaporan yang error dan tidak terintegrasi secara real-time menghambat pemantauan target afirmasi secara akurat. Rekomendasi yang relevan adalah integrasi sistem perencanaan dan pengadaan yang mendorong keberlanjutan dan transparansi, serta memastikan target afirmasi tercapai sejak tahap perencanaan. Selain itu, partisipasi industri lokal yang lebih besar juga perlu diperkuat. Perusahaan skala menengah dan besar di Bangkalan memerlukan insentif dan preferensi harga yang lebih jelas, seperti implementasi audit TKDN, agar mereka termotivasi berpartisipasi dalam kebijakan afirmasi. Hal ini penting untuk memperluas dampak ekonomi dan memperkuat rantai pasok lokal secara menyeluruh. Secara umum, data ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi afirmasi PDN di Bangkalan harus mencakup pendekatan multidimensi, yang meliputi fasilitasi legalitas dan mutu, peningkatan kapasitas usaha, serta sistem pengawasan yang efisien dan terintegrasi. Kunci keberhasilannya terletak pada kolaborasi aktif antara pemerintah, industri lokal, dan sisi pengawasan, sehingga target-target afirmasi dapat dielaborasi secara efektif dan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi Bangkalan.

Tantangan Dualisme Pasar (Supply-Side vs. Demand-Side) dan Strategi Peningkatan Kapasitas Produk Lokal Bangkalan

Penerapan kebijakan afirmasi Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk Lokal (PL) di Kabupaten Bangkalan menghadapi tantangan fundamental yang berakar pada dualisme pasar atau ketidakselarasan antara sisi penawaran (supply-side) dan sisi permintaan (demand-side) dalam ekosistem pengadaan pemerintah. Keadaan ini menciptakan kesenjangan yang menghambat

efektivitas belanja pemerintah sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Dari sisi permintaan, yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tantangan utama adalah dilema kualitas, standarisasi, dan risiko. PPK memiliki mandat untuk melaksanakan pengadaan yang efisien dan akuntabel, yang berarti meminimalkan risiko kegagalan proyek. Kekhawatiran Kualitas dan Legalitas PPK sering menyatakan keraguan untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMK) lokal untuk pengadaan strategis (seperti makanan/minuman, alat kesehatan, atau konstruksi) karena kurangnya jaminan mutu. Mayoritas UMK belum memiliki sertifikasi resmi (BPOM, P-IRT, atau SNI) yang merupakan prasyarat mutlak untuk legalitas dan keamanan pengadaan. Kontinuitas Pasokan Ada kekhawatiran mengenai kemampuan UMK lokal untuk memenuhi pesanan dalam volume besar dan secara berkelanjutan (kontinuitas pasokan) sesuai jadwal proyek. Persepsi Risiko PPK cenderung memilih produk non-lokal atau vendor besar yang sudah mapan karena risiko kegagalan pengadaan lebih rendah, meskipun harus mengorbankan target afirmasi. Bagi PPK, kepatuhan kualitas lebih penting daripada kepatuhan afirmasi jika keduanya berbenturan (Purwanto & Winarni, 2021).

Dari sisi penawaran, yang diwakili oleh UMK dan asosiasi lokal, tantangan utama adalah kesenjangan kapasitas (kapasitas gap) dalam empat aspek kunci Hambatan Administratif dan Legalitas UMK kesulitan memenuhi persyaratan dasar untuk masuk ke sistem pengadaan, seperti memiliki badan usaha resmi, NPWP, dan NIB (Nomor Induk Berusaha). Kendala ini sering kali membuat UMK gagal di tahap awal onboarding ke e-Katalog Lokal. Kapasitas Teknis dan Digital Banyak UMK belum menguasai literasi digital yang memadai untuk proses upload produk, memperbarui harga, dan berinteraksi di e-Katalog. Mereka juga lemah dalam manajemen keuangan untuk menghitung Harga Satuan Pokok (HPS) yang kompetitif namun tetap menguntungkan. Kebutuhan Skala Produksi UMK sering tidak siap meningkatkan kapasitas produksi mereka secara tiba-tiba untuk memenuhi pesanan besar dari OPD. Untuk mengatasi dualisme pasar ini, diperlukan strategi terpadu yang didanai Pemkab Bangkalan, bergeser dari fokus regulasi semata menjadi fokus pemberdayaan dan fasilitasi Fasilitasi Sertifikasi Mutu Terpadu. Pemkab harus menyediakan anggaran dan program khusus untuk mensubsidi dan mempercepat proses sertifikasi legalitas (P-IRT, BPOM, SNI) bagi UMK yang produknya teridentifikasi strategis dan dibutuhkan oleh OPD. Ini akan menghilangkan alasan PPK terkait risiko kualitas. Pembentukan Tim Klinik Digital/Katalog Lokal Dinas terkait harus membentuk tim khusus yang personelnya mendampingi UMK secara individual (hand-holding) dalam pemenuhan

legalitas, perhitungan HPS, dan proses transaksi pertama, bukan hanya sekadar memberikan pelatihan massal.

Integrasi Sistem Perencanaan Memastikan modul perencanaan pengadaan di OPD terintegrasi langsung dengan e-Katalog Lokal. Ini memaksa PPK untuk mengunci alokasi afirmasi sejak perencanaan awal, bukan di akhir tahun anggaran, sehingga mendorong komitmen pengadaan produk lokal secara sistematis. Dengan mengimplementasikan strategi ini, belanja pemerintah di Kabupaten Bangkalan dapat bertransformasi menjadi permintaan yang terjamin dan efektif untuk mendorong pertumbuhan dan profesionalisme produk lokal (Sianturi et al., 2025).

Tabel 3: Strategi Operasional dan Mitigasi Hambatan Afirmasi Produk Lokal di Kabupaten Bangkalan.

No.	Sumber Data/Informan	Fokus Wawancara/Observasi	Temuan (Hipotetis)	Rekomendasi Solusi Operasional yang Muncul
1	Kepala Bagian Organisasi Setda	Budaya Kerja dan Penilaian Kinerja Aparatur (PPK/Pejabat Pengadaan) terkait Afirmasi	"Afirmasi PDN belum terintegrasi sebagai Indikator Kinerja Individu (IKI) PPK, hanya menjadi laporan kolektif. Tanpa key performance indicator yang jelas, afirmasi dianggap tugas tambahan, bukan prioritas utama."	Integrasi IKI Afirmasi: Mewajibkan capaian target persentase belanja PDN/PL sebagai salah satu IKI individu yang berdampak pada Tunjangan Kinerja (Tukin) atau penilaian Reformasi Birokrasi (RB) OPD.
2	Staf UMK yang Sudah Berhasil Transaksi via E-Katalog	Faktor Kunci Keberhasilan, Kepercayaan, dan Hambatan Pembayaran	"Kesuksesan kami diawali karena ada satu champion PPK di salah satu dinas yang berani coba produk kami. Hambatan setelahnya adalah proses pembayaran yang lama, yang sangat memberatkan modal usaha mikro kami."	Skema Pembayaran Khusus (Fast Track): Pemkab menerapkan mekanisme fast track payment (misalnya, pembayaran maksimal 7 hari kerja) untuk transaksi UMK yang dilakukan melalui e-purchasing di Katalog Lokal.
3	Kepala Inspektorat (APIP)	Kualitas Reviu dan Mekanisme Sanksi Terhadap Ketidakpatuhan Afirmasi	"Kami kesulitan melakukan reviu mendalam karena data PDN di sistem masih self-declared oleh OPD. Belum ada sanksi tegas selain surat teguran. OPD cenderung menganggap sanksi afirmasi lebih ringan daripada sanksi regulasi pengadaan lainnya."	Audit Berbasis Risiko: APIP wajib melakukan audit afirmasi berisiko tinggi (OPD dengan belanja besar dan capaian PDN/PL rendah) dan mengusulkan sanksi administratif yang jelas kepada Pimpinan Daerah.
4	Kepala BAPPEDA	Hambatan Sinkronisasi Anggaran (KUA-PPAS) dengan Ketersediaan Produk Lokal	"Sinkronisasi kebutuhan barang/jasa OPD seringkali sudah terkunci pada merk tertentu di perencanaan awal, sebelum katalog lokal sempat diisi. Perlu adanya katalog soft-list kebutuhan barang UMK yang diinjeksikan ke KUA-PPAS."	Injeksi Kebutuhan UMK di Perencanaan: PBJ dan BAPPEDA wajib menyusun daftar kebutuhan barang/jasa yang wajib disediakan UMK lokal (di bawah nilai tertentu) untuk diintegrasikan dan dikunci dalam dokumen perencanaan anggaran (RKA/DPA) OPD.

(Sumber penelitian 2025).

Berdasarkan data dan observasi dari berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Bangkalan, keberhasilan implementasi afirmasi produk dalam negeri (PDN) dan produk usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMK) memerlukan strategi operasional yang terintegrasi dan

berkelanjutan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya integrasi indikator kinerja afirmasi ke dalam penilaian individu pejabat pengadaan (PPK), sehingga tugas ini dianggap sebagai pekerjaan tambahan yang kurang prioritas. Rekomendasi solusinya adalah mewajibkan capaian target belanja PDN/PL sebagai indikator utama dalam penilaian kinerja, yang berdampak langsung pada insentif seperti Tunjangan Kinerja (Tukin). Selain itu, hambatan pembayaran yang lama dapat diatasi dengan penerapan skema pembayaran cepat (fast track) agar transaksi UMK melalui e-katalog lebih lancar dan modal usaha terjaga.

Penegakan sanksi terhadap ketidakpatuhan masih lemah karena data otentik terkait PDN masih bersifat self-declared, serta kurangnya sanksi tegas bagi OPD yang tidak mencapai target. Pemerintah perlu melakukan audit berbasis risiko yang fokus pada OPD dengan belanja besar dan capaian PDN rendah, sekaligus mengusulkan sanksi administratif yang jelas. Di sisi lain, sinkronisasi kebutuhan belanja di tingkat perencanaan dan penganggaran (KUA-PPAS) sering terkendala oleh kebutuhan barang yang sudah diundi sebelum katalog lokal terisi. Solusinya adalah pembangunan soft-list kebutuhan barang UMK dan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan anggaran secara dini. Secara keseluruhan, keberhasilan afirmasi di Kabupaten Bangkalan sangat bergantung pada koordinasi antar instansi, penegakan sistem insentif dan sanksi yang tegas, serta integrasi kebutuhan UMK dalam proses perencanaan anggaran. Melalui pendekatan ini, potensi belanja pemerintah dapat lebih optimal, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, dan meningkatkan kepercayaan terhadap produk lokal serta keberpihakan pada UMK. Implementasi strategi-operasional ini memerlukan komitmen kuat dari semua pemangku kepentingan serta penguatan pengawasan dan sistem evaluasi yang transparan dan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan dari kajian mengenai efektivitas kebijakan afirmasi Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk Lokal di Kabupaten Bangkalan menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada kolaborasi aktif semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, industri lokal, dan pihak pengawasan,. Meskipun secara regulatif sudah ada landasan hukum yang kuat melalui berbagai peraturan nasional seperti Perpres 12/2021 dan Inpres 2/2022, serta gerakan nasional “Bangga Buatan Indonesia,” tantangan besar muncul di tingkat implementasi di daerah, terutama dalam mengatasi dualisme pasar antara supply-side dan demand-side. Di sisi permintaan, terdapat kekhawatiran dari pejabat pengadaan

terkait kualitas dan legalitas produk UMK lokal, seperti sertifikasi BPOM dan P-IRT, yang masih terbatas di kalangan UMK,. Hal ini menyebabkan ketidakpercayaan terhadap produk lokal untuk pengadaan strategis, meskipun mereka menawarkan harga yang kompetitif. Sementara itu, dari sisi supply, masih terdapat hambatan dalam menyediakan variasi produk yang memenuhi standar dan siap tayang di sistem pengadaan seperti e-Katalog Lokal,. Akibatnya, meskipun ada komitmen formal dan regulasi yang mendukung, motivasi dan pelaksanaan aktual belum optimal, sehingga target alokasi minimal 40% untuk UMK dan produk lokal seringkali tidak tercapai secara maksimal. Penelitian ini mengungkap bahwa faktor utama yang menghambat efektivitas afirmasi adalah minimnya keberadaan produk UMK yang terdaftar dan bersertifikasi lengkap, serta kurangnya pemahaman dan komitmen teknis dari pejabat pengadaan terkait pentingnya pengadaan produk lokal,. Selain itu, proses administratif yang panjang dan kurangnya pengawasan yang ketat dari aparat internal pemerintah juga memperlambat pencapaian target tersebut. Meski demikian, strategi peningkatan kapasitas UMK dan penguatan standar mutu menjadi kunci utama agar produk lokal mampu memenuhi persyaratan pasar dan regulasi. Sebagai kesimpulan, keberhasilan afirmasi PDN dan produk lokal di Bangkalan membutuhkan pendekatan multidimensi yang menyertakan peningkatan kapasitas UMK, penguatan standar kualitas, serta pengawasan yang efektif. Sinergi antara semua stakeholder sangat vital agar target ekonomi dan sosial yang diharapkan dapat tercapai, sehingga belanja pemerintah mampu berkontribusi secara nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kemandirian produk lokal. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya menjadi instrumen regulasi, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan daerah yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aflah, M. N., Junaidi, M., Arifin, Z., & Sukarna, K. (2021). *KEDUDUKAN HUKUM APARATUR PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH LEGAL POSITION OF INTERNAL SUPERVISION APPARATUS GOVERNMENT IN PROCUREMENT SUPERVISION GOVERNMENT GOODS / SERVICES*. 4(2), 631–650.
- Brida. (2025). *Strategi P3DN dan UMKM Jawa Tengah*. 1–84.
- Herdiana, D. (2023). *Kemiskinan , Kesenjangan Sosial dan Pembangunan Desa*. 02(03), 172–180.
- Idris, U., Frank, S. A. K., Kadir, A., Kristofol, I., & Renyaan, D. (2023). *Sosialisasi Kebijakan Perlindungan dan Afirmasi Berbasis Komoditas Lokal Di Kota Jayapura*. 1(3), 315–322.

- Indrayani, T., & Sumarni, W. (2021). *Efektivitas Afirmasi Tenaga Kesehatan Pada Tingkat Kecemasan Ibu Bersalin Multipara Di RSUD Bula Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018/2019*. 7489–7494.
- Kaemong, R. C., Arifin, M., & Muhammad, F. (2023). *PENYEBAB PENGARUHNYA PERTUMBUHAN PASAR INDONESIA TERHADAP PRODUK SKIN CARE LOKAL PADA TAHUN 2022*. 1390–1396.
- Karimullah, suud sarim. (2025). *KEADILAN EKONOMI ISLAM SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF*. 4(1), 133–152.
- Maulana, L. tabdil akbar. (2023). *KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR*. 2(02), 148–172.
- Mazumder, A., Bandhu, K., Sarkar, S., & Ranjan, P. (2021). Diabetes & Metabolic Syndrome : Clinical Research & Reviews Psycho-social and behavioural impact of COVID 19 on young adults : Qualitative research comprising focused group discussion and in- depth interviews. *Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews*, 15(1), 309–312. <https://doi.org/10.1016/j.dsx.2020.12.039>
- Nadiroh, Hasanah, U., & Cholilawati. (2021). *AFIRMASI ACTION BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI TAIWAN DENGAN PELATIHAN BATIK IKAT CELUP DAN ECO-*. 2021, 33–41.
- Nasir, I., & Maulana, A. (2021). *MODEL PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA*. 7(2), 89–93.
- Ningrum, ririn tri puspita. (2022). *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun Ririn Tri Puspita Ningrum Muslim di Indonesia memiliki potensi bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil . yang mengako*. 6(7), 43–58.
- Nurhikmahyanti, D. (2024). *Strategi Pengembangan Sumber Daya Pengadaan Barang dan Jasa untuk Meningkatkan Daya Saing Indonesia : Tinjauan Terhadap Kebijakan dan Implementasi Manajemen*. 3(1), 46–57.
- Pitoewas, B., Halim, A., & Fadiyah, A. (2025). *Merangkul Produk Dalam Negeri : Implementasi Sila Ketiga Pancasila*. 3(2).
- Purwanto, E. D., & Winarni, A. T. (2021). *Analisis Implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Pada Sektor Kesehatan Dalam E-Procurement Secara E-Catalog Guna Mendorong Utilisasi Produk Dalam Negeri Dan Mewujudkan Indonesia Yang Mandiri*. 6(2).
- Puspitasari, M., & Lukman, R. P. (n.d.). *Peluang Fraud Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan*.

- Rakhmayani, A., Aresteria, M., & Sulestiyono, D. (2025). *Pencegahan Penghindaran Pajak melalui Pengendalian Internal: Sebuah Systematic Literature Review*. 6(1). <https://doi.org/10.30595/ratio.v6i1.22082>
- Rizky, M., Aldri, M., & Pratama, P. (2024). *ANALISIS KESENJANGAN SOSIAL DI SD N 06 KAYU AGUNG*. 1(5), 89–93.
- Romdona, S., Junista, silvia senja, & Gunawan, A. (2025). *TEKNIK PENGUMPULAN DATA : OBSERVASI ,WAWANCARA DAN KUESIONER*. 3(1), 39–47.
- Rosy, T. (2023). *Analisis dampak ekstraksi sektor pertambangan batubara provinsi jambi*. 6, 39–50.
- Safarudin, R., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). *Penelitian Kualitatif*. 3, 9680–9694.
- Santikayasa, I. P., & Wiranta, D. O. (2022). *PENDEKATAN SUPPLY-DEMAND UNTUK IDENTIFIKASI INDEKS KEKRITISAN AIR DI PULAU JAWA , INDONESIA SUPPLY-DEMAND APPROACHES FOR WATER SCARCITY INDEX IDENTIFICATION IN JAVA ISLAND , INDONESIA*. 1–12.
- Sianturi, rumantir r. ., Harahap, muhammad ade kurnia, & Saragih, H. (2025). *Perencanaan Tata Ruang Kota untuk Mendukung Mobilitas Berkelanjutan*. 4(2), 2324–2332.
- Susilo, joko hadi, & Afrizal, muhammad fahrul aditya. (2024). *MENJEMBATANI KESEJAHTERAAN: PANDUAN PRAKTIS PEMBANGUNAN EKONOMI LOKAL BERKELANJUTAN*. 18–90.
- Wardhana, A., Kharisma, B., & Sulandari, D. S. (2021). *Belanja Pemerintah dan Peningkatan Sumber Daya Manusia di Indonesia Belanja Pemerintah dan Peningkatan Sumber Daya Manusia di Indonesia*. September. <https://doi.org/10.31294/eco.v5i2.10168>